

SKRIPSI

**PENGARUH LITERASI PAJAK, SISTEM INTI ADMINISTRASI
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BADUNG SELATAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : Muhammad Nabiell Shabri Rizq
NIM : 2115654056

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

PENGARUH LITERASI PAJAK, SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Muhammad Nabiell Shabri Rizq
2115654056

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP), dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Badung Selatan. Penelitian ini menggunakan teori *Slippery Slope Framework* (SSF) dan *Technology Acceptance Model* (TAM) sebagai teori utama. Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan teknik sampling aksidental dalam mencari sampel dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui kuesioner dengan skala likert 1-5 yang disebarikan kepada 100 responden wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Sistem Inti Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini didukung oleh teori *Slippery Slope Framework* pada aspek kepercayaan (*trust*) yang dapat mempengaruhi kepatuhan melalui literasi pajak dan kekuasaan (*power*) yang dapat mempengaruhi kepatuhan dengan sanksi pajak, serta *Technology Acceptance Model* yang menjelaskan pentingnya persepsi kegunaan dan kemudahan dari Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan literasi pajak dan penegakan sanksi yang adil serta evaluasi terhadap implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yaitu *coretax* agar lebih efektif mendukung kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Literasi pajak, Sanksi pajak, Sistem inti administrasi pajak, Kepatuhan wajib pajak

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	iv
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	v
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kajian Teori.....	6
B. Kajian Penelitian yang Relevan	9
C. Alur Pikir.....	10
BAB III METODE PENELITIAN	14
A. Jenis Penelitian.....	14
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	14
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	15
D. Keabsahan Data.....	17
E. Analisis Data	18
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Hasil Penelitian	23
B. Pembahasan.....	24
BAB V PENUTUP	36
A. Simpulan	36
B. Implikasi.....	37
C. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan WPOP KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2020-2024.... 1

Tabel 4. 1 Rata-rata skor hasil kuesioner	23
Tabel 4. 2 Hasil uji validitas.....	25
Tabel 4. 3 Hasil uji reliabilitas	26
Tabel 4. 4 Hasil uji normalitas	26
Tabel 4. 5 Hasil uji multikolinearitas	27
Tabel 4. 6 Hasil uji heteroskedastisitas	28
Tabel 4. 7 Hasil uji regresi linear berganda.....	28
Tabel 4. 8 Hasil uji F.....	30
Tabel 4. 9 Hasil uji t.....	31
Tabel 4. 10 Hasil Koefisien determinasi	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Gambaran Umum Kerangka Pikir.....	11
Gambar 2. 2 Hipotesis Penelitian.....	13
Gambar 3. 1 Gambaran Umum Metode Penelitian.....	22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	44
--------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kepatuhan pajak masih menjadi kendala serius di banyak negara dan salah satunya adalah negara Indonesia. Hal ini didukung dengan penurunan nilai *tax ratio* Indonesia sejak 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022 *tax ratio* Indonesia berjumlah 10,38%, lalu pada tahun 2023 *tax ratio* Indonesia berjumlah 10,21% dan pada tahun 2024 rasio pajak Indonesia sebesar 10,07%. Masalah kepatuhan pajak ini memperoleh perhatian besar dari pemerintah, hal ini akan berpengaruh pada penerimaan sektor pajak (Hadipryanto et al., 2023). Layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan publik penting lainnya, semuanya dimungkinkan oleh pajak (Abdu & Adem, 2023). Adapun peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Badung Selatan dengan dasar terdapat penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Data mengenai persentase kepatuhan WPOP yang didapatkan dari KPP Pratama Badung Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Tingkat Kepatuhan WPOP KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah WP OP Aktif	Jumlah WP OP Nonefektif	Jumlah WP OP Terdaftar	Kepatuhan WP (%)	Jumlah WP OP Penunggak Pajak
2020	22.164	51.019	73.183	82,17	3.812
2021	23.179	53.142	76.321	100,75	4.043
2022	24.680	57.075	81.755	100,61	4.260
2023	28.580	60.354	88.934	99,36	4.586
2024	36.782	59.493	96.275	98,72	4.736

(Sumber: Data KPP Pratama Badung Selatan, 2025)

Literasi pajak mengarah pada kesadaran diri dan pengetahuan tentang pajak. Ketika Tantriangela & Setyowati (2023) berbicara tentang literasi pajak, yang mereka maksud adalah kemampuan untuk memahami dan melaporkan pajak dengan benar. Kurangnya pemahaman peraturan perpajakan dapat berakibat penurunan penerimaan pajak negara dengan mengetahui bahwa Indonesia memakai sistem *self assessment* dalam pemungutan pajaknya. Dengan mengetahui hal ini, diharapkan wajib pajak akan lebih konsisten dalam memahami dan menaati peraturan pajak (Risa et al., 2023). Selain itu, pemerintah juga melakukan pembaruan sistem dalam upaya memudahkan pelaporan pajak dengan dibuatnya Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak telah memperbarui sistem pajak Indonesia, yang sekarang beralih dari berbasis manual menjadi berbasis online dengan tujuan untuk memberi wajib pajak layanan pelaporan yang lebih baik saat mereka membayar pajak (Pratiwi & Sofya, 2023). Digitalisasi layanan pajak juga memiliki beberapa keuntungan yang salah satunya adalah mengurangi adanya kecurangan seperti manipulasi data (Henriette & Erasashanti, 2023). Namun, Perubahan prosedur sistem perpajakan tanpa adanya penyesuaian regulasi dan kurangnya kesiapan pemahaman teknologi wajib pajak akan memberikan efek penurunan tingkat kepatuhan yang akan berujung pada penurunan penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mencari solusi akan hal tersebut. Digitalisasi yang dimaksud merupakan pembaruan terbaru dari sistem inti administrasi perpajakan yaitu *coretax*.

Sistem perpajakan memiliki peraturan yang ketat terkait hukuman atas pelanggaran pajak untuk menjamin bahwa pembayaran pajak setiap wajib pajak sesuai dan mengikuti peraturan yang sah (Anto et al., 2021). Efektivitas sanksi pajak masih dipertanyakan apakah mendorong kepatuhan sukarela atau hanya kepatuhan karena terpaksa. Beberapa wajib pajak lebih memilih membayar denda daripada melaporkan tepat waktu, karena menganggap risikonya lebih kecil dibandingkan kerumitan pelaporan. Fenomena tersebut menimbulkan kepatuhan yang bersifat semu, bukan kepatuhan sukarela. Adanya sanksi pajak dapat memastikan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Indah & Setiawan, 2020).

Penelitian literasi perpajakan oleh Risa et al. (2023), kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif oleh literasi perpajakan. Berbeda dengan hasil penelitian oleh Yuliati & Fauzi (2020) yang memperlihatkan bahwasannya kepatuhan wajib pajak tidak terdampak literasi perpajakan. Riset digitalisasi perpajakan yang dilakukan Tambun & Ananda (2022), kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif oleh digitalisasi. Sebuah penelitian oleh Ristiyana et al. (2024) menemukan kesalahan umum dalam sistem digitalisasi perpajakan yang menurunkan persentase kepatuhan wajib pajak. Merujuk pada penelitian tentang sanksi perpajakan yang dilaksanakan oleh Indralaksana et al. (2022), kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh denda pajak. Meskipun demikian, studi oleh Vinti et al. (2022) memperlihatkan bahwasannya denda pajak yang dikombinasikan dengan komunikasi wajib pajak yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh sistem inti administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana pengaruh antara literasi pajak, sistem inti administrasi perpajakan, dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak?

C. Batasan Masalah

Ruang lingkup program studi terbatas pada analisis dampak literasi perpajakan, sistem dasar administrasi perpajakan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Mengetahui pengaruh sistem inti administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

- d. Mengetahui pengaruh literasi pajak, sistem inti administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa membagikan beberapa manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

- 1) Penelitian ini bisa dipakai referensi dan informasi dalam mendapatkan gambaran dan penelitian sejenis.
- 2) Hasil penelitian mampu memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi KPP Pratama Badung Selatan

Temuan penelitian ini diharapkan bisa membantu KPP Pratama Badung Selatan dalam menilai pelayanan perpajakan yang diserahkan kepada wajib pajak.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi Politeknik Negeri Bali dalam kebijakan penyusunan skripsi selanjutnya.

3) Bagi Mahasiswa

Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini bisa memajukan pemahaman yang lebih intensif tentang hubungan antara literasi perpajakan, sistem inti administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini membahas tiga faktor berbeda yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu literasi pajak, sanksi pajak dan sistem inti administrasi perpajakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial (Uji-t) dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,974 > 1,661$. Selain itu, koefisien literasi pajak bernilai positif yang artinya setiap kenaikan satu satuan wawasan wajib pajak akan hal perpajakan, akan disertai dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak sebesar 0,227.
2. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial (Uji-t) dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $4,895 > 1,661$. Selain itu, koefisien sanksi pajak bernilai positif yang artinya setiap kenaikan efektivitas dari satu satuan sanksi pajak, akan disertai dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak sebesar 0,509
3. Sistem Inti Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial (Uji-t) dimana nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $0,360 < 1,661$. Selain itu, koefisien Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) bernilai positif yang artinya setiap adanya peningkatan satu

satuan sistem administrasi perpajakan, akan disertai dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak sebesar 0,027.

4. Literasi pajak, sanksi pajak dan Sistem Inti Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari uji F dimana nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai $14,896 > 2,696$. Selain itu, ketiga variabel tersebut hanya bisa menjelaskan variasi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 31,8% dan 68,2% lainnya dipengaruhi oleh variabel independen lainnya seperti tarif pajak dan kesadaran wajib pajak.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *Slippery Slope Framework* (SSF) dan *Technology Acceptance Model* (TAM). Temuan bahwa literasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mendukung kerangka SSF, di mana kepatuhan dapat dibentuk melalui pendekatan persuasif (kepercayaan melalui literasi) maupun koersif (ancaman sanksi). Ini memperkuat posisi SSF dalam konteks perpajakan Indonesia, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi.

Sementara itu, variabel Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) yang tidak berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa dalam konteks TAM, persepsi kemudahan dan kegunaan dari *coretax* belum secara nyata mendorong kepatuhan. Hasil ini membuka ruang untuk penelitian lanjutan

guna memperdalam pemahaman tentang faktor psikologis dan teknis yang memengaruhi penerimaan sistem digital perpajakan.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar lebih menekankan program edukasi perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi melalui pendekatan yang mudah dipahami, relevan, dan berkelanjutan seperti mengadakan acara seminar ataupun relawan pajak. Peningkatan literasi pajak terbukti menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam membentuk perilaku patuh.

Di sisi lain, hasil signifikan dari sanksi pajak mengindikasikan bahwa penegakan hukum yang konsisten dan tegas tetap diperlukan untuk mendorong kepatuhan. DJP juga perlu mengevaluasi lebih lanjut penerapan SIAP, khususnya dari aspek pengalaman pengguna, agar sistem lebih mudah digunakan dan dipahami oleh wajib pajak.

C. Saran

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi DJP disarankan untuk meningkatkan intensitas program edukasi perpajakan, baik melalui seminar, pelatihan, maupun media digital serta pelaksanaan sanksi pajak dengan lebih tegas dan konsisten. DJP juga disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi dan pemanfaatan dari pembaruan pada sistem inti administrasi perpajakan yaitu *coretax* agar dapat

memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi KPP Pratama Badung Selatan disarankan agar senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik serta memberikan edukasi mengenai pajak melalui *media social* maupun saat melayani wajib pajak.
3. Bagi mahasiswa atau peneliti lainnya, dianjurkan untuk menggunakan variabel independen lain seperti kesadaran wajib pajak dan tarif pajak, serta memperluas cakupan wilayah penelitian agar hasil yang diperoleh lebih representatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdu, E., & Adem, M. (2023). Tax compliance behavior of taxpayers in Ethiopia: A review paper. In *Cogent Economics and Finance* (Vol. 11, Issue 1, pp. 1–13). Cogent OA. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2189559>
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. *Journal of Economic Literature*, 36(2), 818–860. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8282-7_12
- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Aulia, S., Rosdiana, H., & Inayati, I. (2022). Trust, Power, and Tax Risk into the “Slippery Slope”: A Corporate Tax Compliance Model. *Sustainability (Switzerland)*, 14(22), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su142214670>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *Management Information Systems Research Center, University of Minnesota*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/doi:10.2307/249008>
- Fahrianur, Monica, R., Wawan, K., Misnawati, Nurachmana, A., Veniaty, S., & Ramadhan, I. Y. (2023). Implementasi Literasi di Sekolah Dasar. *Journal of Student Research (JSR)*, 1(1), 102–113. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i1.958>
- Hadipryanto, J., Sarah, S., Nuryanti, T., Yeni, Y., Ramadhony, R., & Adhikara, A. (2023). Analysis Of Tax Amnesty Implementation In Tax Revenue In Asian Region Countries. *Riset*, 5(1), 014–028. <https://doi.org/10.37641/riset.v5i1.214>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Henriette, G., & Erasashanti, A. P. (2023). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Era Pandemi Covid-19. *JURNAL MANEKSI*, 12(3), 573–580. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1740>
- Ignas Pau, H., Nawa Pau, S. P. N. P., & F. Angi, Y. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere. *Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen*

Akuntansi Dan Bisnis, 1(2), 6–13.
<https://doi.org/10.55904/cocreation.v1i2.352>

- Indah, N. P. I. P., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 4(3), 440–446. <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2020/03/ZZD2043440446.pdf>
- Indralaksana, A. A., Surwanti, A., & Rahmawati, A. (2022). Pengaruh Pemberian Sanksi Pajak PBB-P2 dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Bantul. *Accounting and Finance Studies*, 2(2), 54–78. <https://doi.org/10.47153/afs22.3702022>
- Jayusman, I., & Agus Kurniawan Shavab, O. (2020). Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. *Halaman | 13 Jurnal Artefak*, 7(1), 13–20. <https://doi.org/10.25157/ja.v7i1.3180>
- Juniarto, H. (2024). Pengaruh Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Minat Penggunaan E Filing Dalam Pelaporan Spt Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 10710–10730. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1>
- Jurais, M. (2019). Pemberian Sanksi Terhadap Ketidaksiplinan Belajar Kelas V Sd Negeri Se Kecamatan Tempel. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 2(2), 202–216. <https://doi.org/10.31316/g.couns.v2i2.68>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (4th ed.)*. (2018). Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kholid, M. N., & Sari, D. N. (2022). Determinant of Citizens' Acceptance of E-government: Examining Semi-online Tax Filing System in Indonesia. *Webology*, 19(1), 2104–2121. <https://doi.org/10.14704/web/v19i1/web19142>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kogler, C., Batrancea, L., Nichita, A., Pantya, J., Belianin, A., & Kirchler, E. (2013). Trust and power as determinants of tax compliance: Testing the assumptions of the slippery slope framework in Austria, Hungary, Romania and Russia. *Journal of Economic Psychology*, 34, 169–180. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.09.010>

- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (Ctas) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru (1st ed.)*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marshall, G., & Jonker, L. (2010). An introduction to descriptive statistics: A review and practical guide. In *Radiography* (Vol. 16, Issue 4, pp. 1–7). <https://doi.org/10.1016/j.radi.2010.01.001>
- Mulyadi. (2024). *Buku Referensi: Panduan Penyusunan Penelitian dengan Metode Kuantitatif dan Kualitatif (1st ed.)*. Penerbit CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Nistiana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.47>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
- Pratiwi, R. Y., & Sofya, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok. *Jurnal Salingka Nagari*, 02(1), 2023. <https://doi.org/10.24036/jsn.v2i1.91>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.1>
- Risa, N., Bilqis, G. D., & Susanti, N. L. (2023). Pengaruh Penerapan Insentif Pajak, Tax Literacy dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 14(1), 72–81. <https://doi.org/10.33558/jrak.v14i1.5842>
- Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1339–1349. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2096>
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>

- Schrand, C. M., & Zechman, S. L. C. (2012). Executive overconfidence and the slippery slope to financial misreporting. *Journal of Accounting and Economics*, 53(1–2), 311–329.
<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.09.001>
- Shamsi, M., Iakovleva, T., Olsen, E., & Bagozzi, R. P. (2021). Employees' work-related well-being during covid-19 pandemic: An integrated perspective of technology acceptance model and jd-r theory. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(22), 1–22.
<https://doi.org/10.3390/ijerph182211888>
- Strauss, M. E., & Smith, G. T. (2009). Construct validity: Advances in theory and methodology. *Annual Review of Clinical Psychology*, 5, 1–25.
<https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.032408.153639>
- Taherdoost, H. (2016). Validity and Reliability of the Research Instrument; How to Test the Validation of a Questionnaire/Survey in a Research. *International Journal of Academic Research in Management (IJARM)*, 5(3), 28–36. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3205040>
- Tambun, S., & Ananda, N. A. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3158–3168. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.999>
- Tantriangela, J., & Setyowati, M. S. (2023). Sharpening the Concept of Tax Literacy as an Effort to Improve Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 9(1), 30–42.
<https://doi.org/10.31289/jab.v9i1.9109>
- Vinti, C., Panjaitan, P., Zulkarnain, I., & Ginting, R. (2022). Persuasive Communication of Tax Officials and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Pratama Tax Service Office of Medan Timur. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 5(2), 8264–8275.
<https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.4609>
- Wahl, I., Kastlunger, B., & Kirchler, E. (2010). *Trust in Authorities and Power to Enforce Tax Compliance: An Empirical Analysis of the “Slippery Slope Framework.”* <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2010.00327.x>
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2), 27–44.
<https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>